



PRESIDEN JOKOWI BERTEMU PERDANA MENTERI DAN GUBERNUR JENDERAL AUSTRALIA

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersalaman dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese disaksikan Gubernur Jenderal Australia David Hurley (kanan) di Admiralty House, Sydney, Selasa (4/7). Dalam kunjungannya ini, Presiden Jokowi juga bertemu dengan pimpinan perusahaan terkemuka di Australia.

Harga Minyak Dunia Lagi Murah, Kapan Harga Pertalite Turun?

Argumentasi Pemerintah baru menurunkan harga BBM bersubsidi bila harga minyak dunia mencapai harga USD65 per barel sangat tidak logis.

JAKARTA (IM) – Anggota Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah untuk transparan dan jujur kepada masyarakat soal anggaran subsidi BBM jenis Pertalite. Ia meminta pemerintah harus dapat menjelaskan kemana alokasi

anggaran subsidi BBM tersebut disalurkan.

Sebab menurutnya, harga minyak dunia terus anjlok namun harga Pertalite di dalam negeri tidak turun-turun. Argumentasi Pemerintah baru dapat menurunkan harga BBM bersubsidi

bila harga minyak dunia mencapai harga USD65 per barel sangat tidak logis.

Dia pun berpendapat itu adalah logika pedagang bukan logika negarawan.

“Menurut saya logika tersebut kurang tepat karena faktanya harga Pertalite Rp10.000 per liter ditetapkan saat harga minyak dunia sebesar USD120 per barel (September 2022). Dengan anjloknya harga minyak mentah dunia dan dengan harga BBM bersubsidi yang dipertahankan tetap maka otomatis terjadi peng-

hematan dana subsidi BBM,” kata Mulyanto, Selasa (4/7).

Dia menambahkan kalau dana subsidi itu dikembalikan untuk mensubsidi harga BBM maka logikanya harga BBM bersubsidi seharusnya turun sebesar 30% - 40% menjadi sekitar Rp6.500 per liter.

Sehingga turunnya harga BBM bersubsidi, katanya tidak harus menunggu hingga harga minyak dunia setara dengan harga keekonomian Pertalite, yakni USD65 per barel. “Yang menjadi pertanyaan

adalah hasil penghematan dana subsidi BBM sekarang ini dilarikan ke mana? Pemerintah harus jujur. Jangan membohongi rakyat dengan logika pedagang. Apakah dana tersebut digunakan untuk mensubsidi mobil listrik atau untuk anggaran pembangunan IKN?”

Jadi ini soal political will dan pilihan pemihakan kebijakan Pemerintah. Mau meringankan rakyat miskin atau tidak,” cecar Mulyanto.

► Bersambung ke hal 11

14 WNI Tertahan di RS Luar Negeri, Mereka Korban TPPO Jual Ginjal

JAKARTA (IM) - Sebanyak 14 warga negara Indonesia (WNI) tertahan di rumah sakit luar negeri. Diduga mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ginjalnya dijual.

“Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7).

“Sehingga masih saya dapat info tadi dari Polri, itu di suatu negara masih ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit dengan

jual ginjal itu,” sambungnya.

Dijelaskan Mahfud, para korban awalnya berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Namun kontrak yang mereka teken ternyata untuk penjualan ginjal. “Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran, di mana begitu. Sampai di sana kontrak jual ginjal. Itu jenisnya,” katanya.

698 Orang Tersangka

Mantan Ketua MK ini menjelaskan, dalam kurun waktu satu bulan, sudah ada 698 tersangka berdasarkan hasil kinerja

► Bersambung ke hal 11

Johnny Plate “Disemprot” Hakim: Jangan Anggap Pengadilan Ini Alat Politik

JAKARTA (IM) - Sidang eksepsi Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo, sempat memanas.

Hakim Fahzal Hendri sempat ‘semproti’ Johnny.

“Di awal uraian eksepsi atau keberatan ini anda sungguh seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Di sini untuk saudara tahu saja, bahwa sidang ini tidak terpengaruh apa-apa, biar saudara tau. Kami tidak ada tendensi politik apa-apa kami bebas dari masalah

politik,” ujar Fahzal di sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Hakim Fahzal mengatakan persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (11/7) pekan depan.

Hakim Fahzal tidak mau Johnny beranggapan bahwa persidangan ini berbau politisasi. Sehingga, ia yakin jika Johnny tidak bersalah maka proses hukum pun akan berbicara demikian.

“Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik, tidak. Tidak lembaga yudikatif terbebas dari

semuanya itu,” ujarnya.

“Kalau terbukti menurut hukumnya, saudara dinyatakan bersalah akan kami hukum, tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, demi hukum saudara harus dibebaskan. Begitu pak,” ujar hakim Fahzal menambahkan.

Sebab itu, ia meminta Johnny untuk tidak terpengaruh dengan pemberitaan maupun kabar miring dari luar pengadilan.

► Bersambung ke hal 11

12 Kasus Pelanggaran HAM Berat pada Masa Lalu Semakin Sulit Diadili

JAKARTA (IM) - Sebanyak 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu semakin sulit diadili. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Pelanggaran HAM berat dari 16 yang ditetapkan Komnas HAM, empat sudah diadili dan bebas semua. Ini sisanya semakin sulit diadili karena buktinya semakin tidak ada,” kata Mahfud dalam rapat kerja dengan Komite I DPD, Selasa (4/7).

Comtohnya, kasus pembunuhan misterius (petrus) pada masa Orde Baru su-

lit terungkap karena orang-orang yang diduga terlibat sudah meninggal dunia.

“Itu kebijakan negara? Kebijakan negara karena Pak Harto pernah mengakui pada waktu itu, ‘saya yang nyuruh’ gitu, tapi kan Pak Harto-nya sudah diturunkan. Benny Moerdani-nya juga udah meninggal, kan tinggal korban-nya,” ujarnya.

Sementara itu, Mahfud mengatakan, korban petrus maupun keluarganya juga tidak terbuka ketika hendak diadili sebagai korban pelanggaran HAM berat.

“Karena malu, ‘saya sudah

► Bersambung ke hal 11



PENANGANAN SATGAS TPPO

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7). Dalam keterangannya, Satgas TPPO berhasil menyelamatkan 1.943 korban dan menetapkan 698 tersangka, sepanjang 5 Juni-3 Juli 2023.

Yayasan Tzu Chi Indonesia
Orang yang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan sepenuh hati akan dapat meningkatkan kebijaksanaannya.
(Master Cheng Yen)

intiland

Bagus PIPi
KIDS Surgical Mask
Masker anak nyaman digunakan sehari-hari
Masker Anak BFE* ≥ 98%
*Sesuai Standarisasi ENI4683:2019
Desain Masker terdaftar
Nyaman dipakai sehari-hari

ASALTAU!
Wanita Hilang Usai Akad Nikah, Seribu Undangan Telah Disebar



SEORANG pengantin wanita hilang usai akan nikah. Padahal sekitar seribu undangan untuk resepsi telah disebar. Awalnya sang pengantin wanita izin ke suaminya untuk pergi mengambil barang pesanan yang tak jauh dari rumahnya. Namun setelah itu, pengantin wanita itu tak pernah lagi kembali ke rumah.

Padahal sang suami telah menyebar

► Bersambung ke hal 11

Lagi, Pria Berbobot 200 Kg akan Dievakuasi ke RSUD di Tangerang



SETELAH almarhum Muhammad Fajri (27), kini seorang pria obesitas akan dievakuasi ke RSUD. Pria bernama Cipto Raharjo (45), warga Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, punya berat badan sekitar 200 kilogram (kg). Kondisinya hampir sama dengan almarhum Fajri, sulit menggerakkan tubuhnya.

Dari video yang diterima, Cipto terlihat

► Bersambung ke hal 11

ACE
The helpful place.

BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah		
MATA UANG	JUAL	BELI
USD	15.012,00	14.988,00
SGD	11.140,00	11.110,00
HKD	1.948,00	1.888,00
AUD	10.084,00	10.034,00
EUR	16.572,00	16.322,00
GBP	19.291,00	18.991,00

Selasa 4 Juli 2023 16.00 WIB